



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
LAPORAN KOMISI XI DPR RI  
MENGENAI PEMBAHASAN RUU TENTANG PENGESAHAN  
PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SEVENTH PACKAGE OF  
COMMITMENTS ON FINANCIAL SERVICES UNDER THE ASEAN  
FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICE  
DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI  
TANGGAL 5 OKTOBER 2020**

---

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Selamat Siang dan Salam Sejahtera bagi kita semua,***

***Yth. Pimpinan dan Anggota Dewan,  
Yth. Menteri Keuangan beserta jajarannya,  
Yth. Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran;  
Serta Hadirin sekalian yang berbahagia,***

Mengawali Laporan Komisi XI DPR RI mengenai hasil Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang *Protocol To Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services Under the Asean Framework Agreement on Services* (Protokol untuk melaksanakan paket komitmen ketujuh Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) Pengesahan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna Dewan hari ini, perkenankan kami mengajak hadirin untuk senantiasa memanjatkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat, Karunia dan Hidayah-Nya kita dapat melaksanakan tugas-tugas konstitusional dalam keadaan sehat wal'afiat. Semoga hal-hal yang akan kita bicarakan dan putuskan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kemajuan serta kesejahteraan bangsa dan negara yang kita cintai.



***Sidang Dewan yang terhormat,***

Berdasarkan surat Presiden Nomor: R-58 Pres/12/2019, tanggal 30 Desember 2019 perihal: RUU tentang *Protocol To Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services Under the Asean Framework Agreement on Services* (Protokol untuk melaksanakan paket komitmen ketujuh Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) menjadi Undang-Undang dan keputusan Rapat konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi DPR RI tanggal 21 Januari 2020, Komisi XI DPR RI ditugaskan untuk melakukan pembahasan terhadap RUU dimaksud.

Menindaklanjuti Keputusan Rapat konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah dimaksud, Komisi XI DPR RI telah melakukan kegiatan pembahasan terhadap RUU tentang *Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services Under the Asean Framework Agreement on Services* (Protokol untuk melaksanakan paket komitmen ketujuh Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa), sebagai berikut:

**Pada tanggal 5 Oktober 2020**, Komisi XI DPR RI telah mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI, Menteri Hukum dan HAM, Ketua DK OJK selaku wakil dari Pemerintah untuk mendengarkan Penjelasan Pemerintah terkait Penerapan RUU tentang *Protocol To Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services Under the Asean Framework Agreement on Services*



(Protokol untuk melaksanakan paket komitmen ketujuh Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa), Pembacaan Naskah Rancangan Undang-Undang, Pendapat akhir mini fraksi, Penandatanganan naskah Rancangan Undang-Undang dan dilanjutkan pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II/Paripurna.

Dalam Pendapat Mini Fraksi-Fraksi disampaikan catatan dan pendapat, sebagai berikut:

#### **A. FRAKSI PDI Perjuangan**

Fraksi PDIP Perjuangan **menyetujui** RUU tersebut untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna.

#### **B. FRAKSI PARTAI GOLKAR**

Fraksi Partai GOLKAR **menyetujui** RUU tersebut untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna.

#### **C. FRAKSI PARTAI GERINDRA**

Fraksi Partai GERINDRA **menyetujui** RUU tersebut untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna.

#### **D. FRAKSI PARTAI NASDEM**

Fraksi Partai NASDEM **menerima** RUU tersebut untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna.



#### **E. FRAKSI PKB**

Fraksi PKB **menyetujui** RUU tersebut untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna.

#### **F. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**

Fraksi Partai DEMOKRAT **menyetujui** RUU tersebut untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna.

#### **G. FRAKSI PKS**

Fraksi PKS **menerima dengan catatan (*minderheid nota*) hasil pembahasan RUU tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Seventh Package of Commitment on Financial Services under ASEAN Framework of Services (AFAS)***, dan menyerahkan Pengambilan Keputusan selanjutnya dalam Rapat Paripurna DPR RI

#### **H. FRAKSI PAN**

Fraksi PAN **menyetujui** RUU tersebut untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna.

#### **I. FRAKSI PPP**

Fraksi PPP **menyetujui** RUU tersebut untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna.



Sedangkan dalam Pandangan Akhir Mininya, Pemerintah menyatakan **menyetujui** dan berkomitmen secara sungguh-sungguh terhadap semua catatan yang diberikan pada saat implementasi Protokol ke-7 AFAS tersebut.

***Sidang Dewan yang terhormat,***

Berdasarkan Pandangan Akhir Mini Fraksi dan Pandangan Akhir Mini Pemerintah, Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Pemerintah **menyetujui** RUU tentang *Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services Under the Asean Framework Agreement on Services* (Protokol untuk melaksanakan paket komitmen ketujuh Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna.

Sebelum mengakhiri laporan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI, dan Pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM dan Ketua DK OJK beserta jajarannya serta Sekretariat Jenderal DPR RI, Sekretariat Komisi XI yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan RUU ini dengan baik dan lancar. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para *stakeholder* yang telah memberikan masukan, pendapat serta saran dan media masa yang telah meliputi



dan memberitakan pembahasan RUU ini mulai dari awal hingga akhir pembahasan.

Kami mengharapkan dengan disetujuinya RUU tentang *Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services Under the Asean Framework Agreement on Services* (Protokol untuk melaksanakan paket komitmen ketujuh Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) menjadi Undang-Undang dapat membuka kesempatan bagi penyedia jasa keuangan domestic untuk memperluas pasar di kawasan Negara Anggota ASEAN serta menciptakan kompetisi yang sehat di pasar jasa keuangan dalam negeri sehingga tercipta efisiensi dan daya saing di bidang perdagangan barang dan jasa.

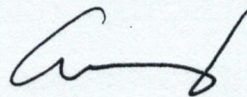
Dengan penetapan RUU Ratifikasi AFAS ini menjadi UU, akan memberikan landasan hukum bagi Pemerintah dan lembaga negara terkait untuk melaksanakan Protokol dimaksud yang akan memberikan keuntungan bagi Indonesia, antara lain penyedia jasa keuangan Indonesia dapat beroperasi di Pasar keuangan Negara ASEAN, peningkatan ketersediaan produk jasa keuangan yang terjangkau dan berkualitas di dalam negeri, dan peningkatan investasi dari Negara Anggota ASEAN di Indonesia untuk mendorong perkembangan industri dan pengembangan pelaku usaha domestik.



Demikian laporan hasil pembahasan Komisi XI DPR RI terhadap RUU tentang *Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services Under the Asean Framework Agreement on Services* (Protokol untuk melaksanakan paket komitmen ketujuh Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa), atas perhatian dan persetujuan Rapat Paripurna ini kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.***

**Jakarta, 5 OKTOBER 2020  
PIMPINAN KOMISI XI DPR RI  
K E T U A,**



**H. DITO GANINDUTO, MBA  
A-309**